

**STRATEGI ANGOLA DALAM RESOLUSI KONFLIK PERANG
SAUDARA (1975-2002)**

Rizqi A. Nugroho¹
Septyanto Galan Prakoso , S.IP, M.Sc²

Abstract

Angola immediately entered the period of civil war after independence from the Portuguese. The government's strategy in dealing with the civil war that broke out in Angola for 27 years, this is the main topics examined in this study. Angola government's strategy is being examined from the third party involvement and military approach. This research uses a qualitative approach with literature study and interview via email. Data analysis draws on qualitative analysis consisted of multiple steps such as data reduction, analysis, data presentation, and then drawing conclusions. The framework of this research is based on analysis of ethnic institutionalization, the commencement of rebellion, and using conflict resolution theory by Dean G. Pruitt. The results of this research shows that the beginning of conflict is based on the 'gap' between ethnic groups that is not followed with the process of power sharing. Thus, the conflict becomes more severe. In addition, the foreign powers that sponsor two conflicting parties extend the course of the conflict. Humanitarian interventions from the UN also failed to bring together MPLA and UNITA. But after UNITA committed a mistake MPLA managed to exploit it. The MPLA also gained additional legitimacy from the international community. Finally, the MPLA changed its strategy to end the civil war to 'peace through war' and continued to press UNITA until it signed a peace agreement. So, it can be concluded that the involvement of third parties adds the dynamics of civil war and MPLA policy to launch military action against UNITA succeed to actualize 'peace'.

Keywords: Civil War, MPLA, UNITA, Third-party Involvement, Power-sharing, Conflict Resolution.

[1] Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS. Sebagai penulis Pertama
[2] Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS, Sebagai penulis Kedua

Pendahuluan

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, bukan serta merta dunia menjadi damai. Pasca perang dunia, banyak negara yang menjadi bangkrut dan terpuruk. Amerika Serikat dan Uni Soviet berdiri sebagai patron penyelamat untuk negara yang sedang dalam masa pemulihan pasca perang. Setelah perang dunia kedua juga menjadi momentum bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah untuk merdeka. Negara penjajah yang kebanyakan dari kawasan eropa, masih sibuk untuk bangun dari keterpurukan pasca perang dunia kedua. Kebanyakan bangsa yang terjajah berada di wilayah bumi bagian selatan, seperti Asia dan Afrika. Sebagai negara baru tentunya masih sibuk untuk merumuskan cara untuk membawa negara mereka ke arah yang lebih baik dan masih juga memformulasikan kebijakan-kebijakan yang tepat. Tidak lupa juga pada masa setelah perang dunia kedua, banyak negara yang masih 'buta arah'. Menentukan ideologi adalah salah satu cara bagi negara-negara baru supaya mempunyai tujuan.

Amerika dan Uni Soviet saling berebut pengaruh terhadap negara-negara yang sedang memulihkan diri atau negara yang sedang berjuang untuk lepas dari kolonial supaya 'menganut' paham salah satu negara adidaya tersebut. Persaingan ditunjukkan melalui *proxy war*. Definisi dari *proxy war* adalah perang antara dua pihak yang tidak secara langsung (menggunakan pihak ketiga) menyerang satu sama lain.^[1] *Proxy war* yang paling dikenal adalah *Second Indochina War* (perang Vietnam). Pihak yang terlibat perang ini adalah komunis dan anti komunis. Komunis adalah Vietnam Utara beserta sekutunya seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan negara komunis yang lain. Sedangkan Vietnam Selatan di dukung oleh negara anti komunis seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Perang akhirnya dimenangkan oleh Vietnam Utara karena kebanyakan rakyat mendukung komunis. *Proxy war* ini mengakibatkan korban jiwa pribumi yang cukup banyak,

¹ "What is a Proxy War?," The Vietnam War, 8 Mei 2014, dilihat 13 Mei 2016, <http://thevietnamwar.info/proxy-war/>

baik di Vietnam Selatan maupun Vietnam Utara, bahkan penduduk sipil juga menjadi korban.^[2]

Perang Dingin berakhir ketika Uni Soviet runtuh pada awal dekade 1990an. *Proxy war* juga tak hanya terjadi di Asia saja, melainkan juga terjadi di belahan bumi bagian lainnya, di benua Afrika.^[3] *Proxy war* memang bukan hal baru di Afrika, pada zama kolonial, negara-negara Eropa yang datang ke Afrika untuk menjajah menggunakannya untuk saling unjuk kekuatan. Selain itu alasan mengapa bangsa eropa datang ke benua hitam ini karena benua ini kaya. Banyak cadangan mineral yang dapat ditemukan di Afrika. Kekayaan akan emas, permata, dan mineral langka lainnya tentu saja menggiurkan bagi negara penjajah. Benua Afrika diperkirakan mempunyai 30 persen cadangan mineral yang ada di dunia.^[4] Selain mineral, penjajah juga memperdagangkan pribumi-pribumi untuk menjadi budak. Budak-budak di jual kepada negara kolonial lainnya untuk dieksplotasi tenaganya di perkebunan maupun tambang.

Angola salah satu contoh negara jajahan. Angola terletak di wilayah utara Afrika, diduduki Portugal sejak abad ke 15.^[5] Setelah perang dunia kedua berakhir, negara yang berdekatan dengan Republik Demokratik Kongo ini sempat dijadikan Portugal sebagai provinsi *exclave*. Perjuangan untuk merdeka dari Portugal sudah dimulai sejak 1961 dengan tiga gerakan nasionalis yang turut serta melawan tentara kolonial Portugal. Gerakan nasionalis di Angola, antara lain; *Movement for the Liberation of Angola* (MPLA) , *National Union for the Total Independence of Angola* (UNITA) , *National Liberation Front of Angola* (FNLA) perlawanan melawan penjajah dilakukan selama 14 tahun.^[6]

² Sam Tanenhaus, "Playing Dominoes : A re-examination of the Vietnam War argues it was politically necessary," The New York Times, 24 Oktober 1999, dilihat 13 Mei 2016, <https://www.nytimes.com/books/99/10/24/reviews/991024.24tanent.html>

³ Jennifer L. DeMaio, "Plausible Deniability: Proxy Wars in Africa," Fletcher Security Review, 22 Mei 2014, dilihat 13 Mei 2016, <http://www.fletchersecurity.org/#!de-maio/cpm1>

⁴ Steve Boyes, "Getting to Know Africa: 50 Interesting Facts," National Geographic, 31 Oktober 2013, dilihat 13 Mei 2016, <http://voices.nationalgeographic.com/2013/10/31/getting-to-know-africa-50-facts/>

⁵ "Angola – History & Background," State University, dilihat 13 Mei 2016, <http://education.stateuniversity.com/pages/32/Angola-HISTORY-BACKGROUND.html>

⁶ "Angola National Liberation 1961-1974 (1966-1989)," Global Security, dilihat 13 Mei 2016, <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/angola.htm>

Perjuangan rakyat Angola terbayar ketika pada tahun 1974. Portugal mengalami peristiwa politik yang membuat Angola semakin dekat dengan kemerdekaannya. Peristiwa tersebut adalah Revolusi Bunga yang mengakhiri rezim *Estado Novo* (Orde Baru). Salah satu langkah diambil rezim baru Portugal adalah melepaskan wilayah-wilayah jajahannya. Angola, Mozambik, dan Timor Leste adalah beberapa negara yang diberikan kemerdekaan oleh rezim baru Portugal. Pasca lepas dari Portugal, rakyat di Angola tidak bahu-membahu untuk membangun negaranya. Melainkan terjebak oleh perang saudara memperebutkan kekuasaan. Perebutan kursi untuk menentukan siapa yang berhak memimpin Angola, berlanjut menjadi pertumpahan darah.

Berawal ketika Portugal resmi memberikan Angola kemerdekaannya pada Januari 1975. Ketiga pihak bertemu dengan Portugal untuk penyerahan kemerdekaan Angola. Kontak senjata dimulai setelah penyerahan kemerdekaan. Semua gerakan nasionalis ingin menguasai Luanda, UNITA dan FNLA mendapat bantuan dari Amerika Serikat, Zaire serta Afrika Selatan, dan MPLA mendapat dukungan dari Kuba dan Soviet. Masih kental suasana perang dingin kala itu, ditambah dengan kegagalan Amerika Serikat membendung pengaruh komunis di Vietnam, Amerika Serikat harus hati-hati dalam proxy war ini. Mulai masuknya kekuatan asing menyebabkan konflik memasuki *level* baru, perebutan kekuasaan semakin terasa di Angola. Keadaan menjadi lebih parah saat Portugal tidak mengawal proses transisi kekuasaan. Sehingga *power-sharing* tidak terwujud di Angola. Menyebabkan konflik berlanjut hingga lebih dari seperempat abad.

27 Tahun Perang Sipil

Terdapat tiga kekuatan besar di Angola MPLA, FNLA, dan UNITA. Masing-masing gerakan ini adalah basis dari suatu etnis. MPLA basis dari etnis Kimbundu (dan peranakan *mesticos*, *mulattos*, *assimilados*), FNLA basis dari etnis Bakongo, dan UNITA basis dari etnis Ovimbundu.^{[7][8][9]} Permulaan perang

⁷ “Angola-Introduction,” Global Security, dilihat 24 Desember 2016, <http://www.globalsecurity.org/military/world/angola/intro.htm>.

⁸ “FNLA (Angola),” CRW Flags, dilihat 24 Desember 2016, <https://flagspot.net/flags/ao%7Dfnla.html>

⁹ “UNITA,” Global Security, dilihat 24 Desember 2016, <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/unita.htm>

sipil di Angola ditengarai tiga faktor yaitu: Persaingan antar etnis, kolonialisme, dan sumber daya alam yang melimpah.¹⁰

Sentimen antar etnis yang tinggi membuat konflik pasca kemerdekaan ini tidak terhindarkan. MPLA seperti yang sudah diketahui, mewakili kaum intelektual modern dimana sebagian dari kader mereka adalah *mesticos*. Kaum *mesticos* mempunyai warna kulit yang lebih terang dibandingkan dengan etnis Bakongo maupun Ovimbundu. Setiap partai mempunyai agenda masing-masing. FNLA dianggap masih mempunyai ambisi untuk merestorasi kejayaan Kerajaan Kongo oleh para rivalnya. Ovimbundu kebanyakan dari supporter UNITA, sejak zaman kolonial dulu dikirim oleh Portugis untuk mengurus kebun kopi karena mereka dianggap lebih superior secara fisik.¹¹ Sementara MPLA dianggap tidak mewakili masyarakat pribumi Angola oleh UNITA karena mempunyai kader peranakan (*mesticos & mulattos*) yang tidak mencerminkan *real African*. MPLA didukung oleh etnis Kimbundu, *mesticos*, dan *assimilados*. Dimana sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang terpelajar dan berdomisili di kota dekat dengan pesisir/pelabuhan. Hal tersebut adalah salah satu keuntungan MPLA karena Portugis membangun infrastruktur di kota dan mereka berdomisili di kota. Ovimbundu mempunyai sentimen terhadap orang-orang pesisir terutama dengan etnis Kimbundu. Sentimen dan agenda seperti yang sudah dijelaskan itulah yang membuat konflik sipil di Angola tidak terhindarkan.

Selain itu kolonialisme di Angola sudah terjadi selama ratusan tahun berdampak pada konflik ini. Negara kolonial dari Eropa berbondong-bondong untuk datang ke Afrika untuk mengeksploitasinya. Akan tetapi, belum ada batas jelas sehingga sering terjadi pertikaian antara negara kolonial satu dengan lainnya. Akhirnya para pemimpin negara-negara eropa berkumpul di Berlin untuk merundingkan untuk menyelesaikan masalah ini. Perundingan tersebut memulai *Scramble of Africa*, dimana negara kolonial 'mengkotak-kotakan' wilayah tanpa

¹⁰ "The Angolan Civil War (1975-2002): A Brief History," South Africa History Online, dilihat 25 Desember 2016, <http://www.sahistory.org.za/article/angolan-civil-war-1975-2002-brief-history>

¹¹ "Angola: The roots of conflict," BBC News, dilihat 25 Desember 2016, http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/01/99/angola/263954.stm

mengetahui kondisi lokal.¹² Akhirnya dalam satu ‘kotak’ terdapat beberapa etnis yang menimbulkan celah antar etnis. Terlebih lagi Portugis terlihat ‘pilih kasih’ dalam memperlakukan etnis Kimbundu daripada etnis Ovimbundu yang menambah sentimen antar etnis. Terakhir adalah sumber daya alam di Angola. Menjadi salah satu alasan mengapa pihak-pihak ingin menguasai Angola. Negeri ini kaya akan sumber daya mineral seperti minyak, berlian, tembaga bahkan uranium. Pada dekade 1990an, minyak dan berlian ‘mensponsori’ keberlanjutan perang antara pemerintah dan UNITA.¹³

Alur Perang Sipil¹⁴

Perang sipil ini berlangsung selama seperempat abad. Tiga pihak yang ikut dalam perang sipil ini pun mempunyai negara yang membantunya baik secara finansial maupun fisik. Perang dimulai sebelum tanggal kemerdekaan yang disepakati di perjanjian Alvor. FNLA dan UNITA menyerang Luanda yang dikuasai oleh MPLA. Ketiga pihak berambisi untuk menguasai kota ini saat 11 November 1975 dan membentuk pemerintahan sesuai dengan agenda organisasi masing-masing.

MPLA sudah lama mempunyai basis di Luanda, itulah yang menjadi salah satu keunggulan mereka. Bukan hanya itu, MPLA mendapatkan bantuan dari Soviet berupa persenjataan dan dari Kuba personel militer yang siap melatih dan membantu mempertahankan Luanda. Di awal perang sipil, FNLA berhasil di hancurkan oleh MPLA saat mencoba merebut Luanda. Alasannya karena negara-negara yang membantunya satu persatu menarik bantuannya mulai dari Amerika Serikat yang tidak bisa secara langsung membantu menumpas komunis karena *Clark Amendment*. Dalam Amandemen yang digagas oleh Senator Dick Clark tersebut, melarang AS untuk membantu kelompok atau organisasi yang sedang

¹² Michalopoulos dan Elias Papaioannou, “THE LONG-RUN EFFECTS OF THE SCRAMBLE FOR AFRICA,” National Bureau of Economic Research, November 2011, dilihat 25 Desember 2016, <http://www.nber.org/papers/w17620>.

¹³ Adrian Gonzalez, “Petroleum and its Impact on Three Wars in Africa: Angola, Nigeria and Sudan,” dilihat 17 April 2017, <http://www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-conflict-and-development/issue-16/petroleumangolanigeriasudan.pdf>.

¹⁴ David Birmingham, *A Short History of Modern Angola*, (Oxford University Press : 2015) h. 109.

berkonflik di Angola. Bukan hanya itu, bantuan dari Zaire juga ditarik pelan-pelan oleh Mobutu yang akhirnya membuat FNLA diujung tanduk.

MPLA berhasil mempertahankan Luanda dan membentuk pemerintahan dengan menunjuk Agostinho Neto sebagai Presiden pertama Angola. Neto ditunjuk menjadi Presiden karena pada saat itu Neto adalah figur paling berpengaruh di MPLA. Jasa Neto terhadap MPLA yaitu berhasil meyakinkan Kuba untuk ikut membantu perjuangan MPLA baik sewaktu melawan Portugis maupun perjuangan pasca kemerdekaan.¹⁵ FNLA dihancurkan oleh pasukan MPLA dengan sekutunya. Holden Roberto mundur ke Zaire dan sisa dari MPLA bergabung dengan UNITA mengikuti komando dari Savimbi dalam melawan MPLA. Sebelum dekade 1980an UNITA bisa dibilang organisasi yang paling lemah dibanding dengan FNLA dan MPLA. Namun, sedikit demi sedikit mengimpun kekuatan melalui pendekatan kepada masyarakat di pedalaman. Ditambah juga dengan FNLA yang hancur dan pindah untuk mendukung UNITA. Support dari luar datang dari Afrika Selatan rezim Apartheid dan Amerika Serikat secara tidak langsung. Pada akhir dekade tepatnya pada 10 September 1979 Agosinho Neto Presiden Angola dan petinggi MPLA meninggal dunia di Moskow saat akan menjalani proses operasi kanker pankreas yang dideritanya.¹⁶ Neto digantikan oleh Jose Edurado dos Santos sebagai Presiden Angola. Dengan menghilangnya FNLA, perlawanan yang didapat MPLA hanyalah dari UNITA. Perkembangan UNITA pada saat itu bukanlah hal yang harus di remehkan oleh MPLA. Awal dekade 1980an perkembangan militer UNITA mulai terlihat. Strategi UNITA dari sebelumnya gerilya sudah mulai berubah dalam perang terbuka. UNITA menguasai daerah perbatasan Angola dengan negara tetangga Zambia dan Zaire. Daerah strategis digunakan untuk jalur suplai dan jalur infiltrasi maupun melarikan diri. Pada periode 1984-1987 UNITA terus menekan ke wilayah utara dengan bantuan udara dari Afrika Selatan.

¹⁵ "Cuba and the struggle for democracy in South Africa," South Africa History Online, dilihat 25 Desember 2016, <http://www.sahistory.org.za/article/cuba-and-struggle-democracy-south-africa>

¹⁶ "Neto's Death," TIME, dilihat 25 Desember 2016, <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,947403,00.html>

Pertempuran banyak terjadi antara MPLA-Kuba melawan UNITA-Afrika Selatan. Salah satu pertempuran besar terjadi, yaitu Pertempuran Cuito Cuanavale yang terjadi 1987-1988. Pertempuran ini adalah pertempuran terbesar di Afrika setelah pertempuran El-Alamien. Cuito Cuanavale adalah sebuah kota di provinsi Cuando Cubango, Angola. Pertempuran ini dipicu keinginan MPLA-Kuba yang ingin menghancurkan UNITA yang berujung turunnya SADF (*South African Defence Forces*) dengan batalion mekanik beserta kendaraan tempur lengkap sehingga pecahlah perang besar antara kedua kubu. Tujuan utama SADF adalah untuk menyelamatkan UNITA. Sedangkan MPLA-Kuba mempunyai tujuan baru yaitu untuk memukul mundur SADF. Kedua belah pihak mengalami kerugian. Tidak jelas siapa yang menang dalam pertempuran ini, karena kedua belah pihak saling mengklaim mereka memenangkan pertempuran ini.

Dampak dari pertempuran ini ialah merdekanya Namibia serta penarikan puluhan ribu pasukan Kuba dari Angola. Diadakanya New York Accords yang dihadiri oleh Kuba, Angola, dan Afrika Selatan menyepakati kedua hal tersebut. Perjanjian ini ditandatangani oleh ketiga pihak pada 22 Desember 1988.¹⁷ Kuba dalam membantu pemerintah Angola, tidaklah setengah hati. Dimulai pada perang melawan Portugis, Kuba sudah emmbantu MPLA dengan mengirimkan personil untuk melatih kader MPLA. Pasca kemerdekaan Kuba semakin intensif, di tahun 1977 sudah ada sekitar 20.000 personil Kuba yang berada di Angola. Walaupun pada periode 1977-1983 peran mereka tidak terlalu signifikan dalam melawan UNITA, tetapi Castro tetap menambah jumlah pasukan Kuba yang dikirim ke Angola mencapai 45.000 personil.¹⁸

Pada perjanjian New York didalamnya terdapat syarat UNITA bahwa pasukan Kuba ditarik dari Angola secara bertahap. Upaya diplomasi berlanjut pada Juni 1989, saat Mobutu Sese Seko mengumpulkan beberapa kepala negara di Afrika dan mencoba menjadi mediator dalam gencatan senjata di Angola. Jose Eduardo dos Santos dan Savimbi dipertemukan di Gbadolite untuk

¹⁷ Paul Lewis, "Angola and Namibia Accords Signed," *The New York Times*, dilihat 25 Desember 2016, <http://www.nytimes.com/1988/12/23/world/angola-and-namibia-accords-signed.html>

¹⁸ "Cuba: Havana's Military Machine," *The Atlantic*, dilihat 26 Desember 2016, <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1988/08/cuba-havanas-military-machine/305932/>

menandatangani deklarasi Gbadolite untuk mendinginkan kedua belah pihak. Namun, deklarasi yang di inisiasi oleh Mobutu Sese Seko ini tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mendamaikan kedua pihak.¹⁹ Setelah kegagalan mediasi oleh Mobutu Sese Seko. Pada tahun 1989-1991 terjadi banyak pergolakan politik, seperti gejolak politik di eropa timur dan tentunya disintegrasi Uni Soviet. Kedua hal tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap MPLA mengingat dukungan yang berasal dari negara eropa timur terutama Uni Soviet sangat signifikan bagi MPLA. Pemerintah Angola dalam hal ini MPLA mulai 'meninggalkan' pemahaman Marxist-Leninism dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengubah konstitusi dari partai tunggal menjadi multi partai.

Pertempuran antara MPLA dan UNITA masih terjadi. Salah satunya adalah pertempuran Mavinga yang terjadi pada 23 Desember 1989. Upaya dari pertempuran tersebut yaitu MPLA yang mencoba memukul mundur UNITA di Angola bagian selatan. Akan tetapi, usaha tersebut gagal, UNITA masih bertahan dan MPLA mengalami kerugian yang cukup banyak. Akhirnya memaksa kedua pihak untuk melakukan solusi dengan negosiasi. Perundingan ini diwujudkan dalam pertemuan yang diadakan di Lisbon, Portugal. Bicesse Accords juga disering dikenal dengan nama Estoril Accords ditandatangani oleh kedua pihak pada 31 Mei 1991. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan di dalam perjanjian itu. Pertama yaitu UNITA akan berhenti memobilisasi kadernya dan akan berintegrasi dengan angkatan bersenjata Angola (*Forças Armadas Angolanas – FAA*). Angola resmi mengadopsi sistem multi partai dan mengadakan pemilu pada 29-30 September 1992.²⁰ Pemilu multi partai pertama yang diadakan di Angola ini dimenangkan oleh MPLA dengan total suara 54% disusul UNITA dengan 34% suara.²¹ Jonas Savimbi tidak terima dengan hasil pemilu tersebut dan menuduh telah dicurangi. Sehingga membatalkan gencatan senjata dan kembali kedalam konflik sipil.

¹⁹ Stephen L. Wright, *Angola A Modern Military History 1961-2002*, (Palgrave Macmillan : 2011) h. 92-93.

²⁰ "Angola 1992 Elections," Inter-Parliamentary Union, dilihat 26 Desember 2016, http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2007_92.htm

²¹ Inter-Parliamentary Union, *Ibid.*

UNITA berada di atas angin dengan menguasai sebagian besar dari Angola. Konflik terus berlanjut hingga akhirnya pada 1993, diperkirakan sekitar 1000 jiwa meninggal tiap harinya pada tahun itu.²² UNITA menghadapi masalah baru, dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk mengembargo UNITA. Embargo tersebut dikeluarkan pada September 1993. Secara spesifik melarang distribusi senjata, amunisi, kendaraan berah, dan peralatan perang lainnya. Serangan balik pemerintah Angola dimulai pada tahun 1994, Pemerintah menyerang melalui udara. Kekuatan udara lewat pesawat Sukhoi dan MiG yang diterbangkan oleh pilot asing. Bukan hanya itu, MPLA juga menyewa jasa dari PMC (*Private Military Company*) dari Afrika Selatan bernama '*Executive Outcomes*' yang menjadi momok bagi UNITA.²³

Akhirnya diadakan perundingan untuk membahas gencatan senjata di ibukota Zambia, Lusaka. Perundingan ini bernama Protokol Lusaka. Protokol ini ditandatangani pada 31 Oktober 1994. Uniknya, bukan Jonas Savimbi dan Dos Santos sendiri yang menandatangani Protokol ini. Kedua belah pihak mengirim wakilnya, UNITA mengirimkan Sekjen Eugenio Manuvakola sedangkan Dos Santos mengirimkan menteri luar negerinya Venancio de Moura.²⁴ Pada Protokol Lusaka ini, syaratnya hampir sama dengan *Biccese Accords*. Mengintegrasikan kedua pihak, sejumlah militan UNITA akan bergabung dengan kesatuan polisi negara. Perwira di UNITA juga akan menjabat sebagai perwira saat bergabung dengan FAA. Tentara bayaran (*Executive Outcomes*) kembali ke negara asal dan kedua belah pihak (UNITA dan Pemerintah Angola) berhenti mencari bantuan asing. Pemerintah Angola juga akan menunjuk anggota UNITA sebagai pejabat di kementerian Pertambangan, Perdagangan, Kesehatan, dan Pariwisata. Terakhir, pemerintah juga akan membebaskan tahanan yang terlibat perang sipil. PBB mengirimkan observer untuk mengawal implementasi Protokol Lusaka ini. Akan tetapi, seperti perundingan yang lalu, Protokol Lusaka juga tidak mampu meredam perang sipil di Angola. UNITA tetap menyerang FAA juga sebaliknya.

²² Dawn Hewwit, "Peacekeeping and the Lusaka Protocol," *Questia*, dilihat 26 Desember 2016, <https://www.questia.com/library/journal/1G1-80056876/peacekeeping-and-the-lusaka-protocol>

²³ *Ibid.*

²⁴ "IV. THE LUSAKA PEACE PROCESS," Human Rights Watch Report, dilihat 26 Desember 2016, <https://www.hrw.org/reports/1999/angola/Ang1998-04.htm>

Pemerintah dan UNITA juga tidak mematuhi protokol dengan terus membeli senjata serta peralatan militer yang dilarang dalam protokol. Bahkan pada tahun 1995, tentara bayaran dari Afrika Selatan juga belum di repatriasi oleh pemerintah Angola.

Sampai pada akhirnya pemerintah memulangkan *Executive Outcomes* pada awal tahun 1996. Tahun-tahun berikutnya masih diisi dengan perang antara kedua pihak. UNITA tidak menghentikan mobilisasinya, lewat serangan kecil-kecilan pada banyak tempat yang dikuasai pemerintah. UNITA juga mengincar area pertambangan berlian untuk dikuasai. Pemerintah melakukan hal yang sama dengan menyerang basis-basis UNITA. Kondisi di Angola tidak terkendali pada waktu itu, bahkan pasukan perdamaian dari PBB tidak banyak berpengaruh. Setelah dua dekade lebih terpuruk dalam perang sipil. Pada awal tahun 2002 pemimpin UNITA, Jonas Savimbi akhirnya tewas tertembak. Savimbi ditembak oleh FAA di provinsi Moxico. Pemimpin UNITA itu meninggal dengan 15 luka tembak.²⁵ Tanpa Savimbi UNITA melemah yang akhirnya melakukan perjanjian dengan pemerintah untuk demobilisasi. Hal ini menandai berakhirnya perang sipil di Angola selama lebih dari seperempat abad.

Eskalasi Konflik antara Pemerintah dan UNITA

Konflik dapat dipahami sebagai proses yang bergerak dari tingkat paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga tingkat yang paling tinggi. Konflik umumnya berlangsung susul menyusul dari satu ronde ke ronde berikutnya. Di sini dapat dilihat bahwa jika tidak ditangani dengan baik, sebuah konflik dapat melahirkan konflik baru dengan intensitas yang lebih tinggi. Perihal yang biasanya meningkat adalah intensitas kekerasannya, jumlah aktornya (semakin banyak sekutu, semakin banyak pasukan), teknik dan persenjataan (dari tangan kosong ke batu, ke parang, ke pistol, ke bom, dan seterusnya), serta kerumitan masalahnya.²⁶

²⁵ "Savimbi 'died with gin in hand'," BBC News, dilihat 26 Desember 2016, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1839252.stm>

²⁶ Diah Kusumaningrum, "Eskalasi dan Deeskalasi Konflik," Universitas Gadjah Mada, dilihat 12 Maret 2017, <http://diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Eskalasi.doc>.

Setiap ronde memiliki titik puncak terjadinya kekerasan. Penting diingat bahwa konflik selalu memiliki ‘periode tenang’ antara satu puncak ronde dengan awal ronde berikutnya. Periode ini, di mana semua pihak sudah melewati puncak konflik, adalah waktu terbaik untuk mengintervensi konflik. Jika momentum intervensi ini dilewatkan, periode tenang dapat berubah menjadi ‘masa persiapan’, di mana pihak-pihak yang berkonflik menyiapkan segenap kekuatan guna memasuki ronde konflik berikutnya (misalnya dengan menghimpun pasukan atau menambah senjata baru).²⁷ Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa periode tenang adalah periode yang sangat menentukan apakah konflik yang ada akan mengalami eskalasi atau de-eskalasi. Hal ini tergantung pada efektivitas intervensi yang dilakukan pada periode tenang.²⁸

Konflik juga dipengaruhi dengan kuatnya institusionalisasi negara terhadap pengelompokan etnis juga menambah kemungkinan pecahnya konflik.²⁹ Portugis saat menjajah Angola, membagi masyarakat kedalam kelompok-kelompok. Luanda, ibukota koloni Portugis di Angola berdatang di pesisir yang berdekatan dengan tempat tinggal etnis Kimbundu. Karena berdekatan dengan ibukota sebagian etnis Kimbundu dapat berbaur dengan penjajah portugis dan dapat menikmati fasilitas di ibukota seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Portugis pun juga memberikan status kepada masyarakat yang dianggap ‘setara’/’beradab’.

Assimilados adalah sebutan untuk warga lokal yang sudah mengenyam pendidikan dan dianggap ‘beradab’ oleh pemerintah Portugis.³⁰ Sebaliknya penduduk yang berada di pedalaman Angola dimana didominasi oleh etnis Ovimbundu dipekerjakan oleh kolonial portugis sebagai tenaga kasar dan kebanyakan mereka tidak bisa mendapat status sebagai *Assimilados*. Akhirnya,

²⁷ Diah Kusumaningrum, *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Evan S. Lieberman dan Prena Singh, “The Institutional Origins of Ethnic Violence,” dilihat 12 Maret 2017, http://dc-20788-1635065795.us-east-1.elb.amazonaws.com/system/files/research/documents/lieberman_the_institutional_origins_of_ethnic_violence.pdf.

³⁰ Dr. T. Obi Onyefulu, “THE PORTUGUESE IN ANGOLA: COLONIAL THEORY AND THE POLICY OF ASSIMILATION,” The Nigerian Academic Forum, dilihat 21 Desember 2016, <http://www.globalacademicgroup.com/journals/the%20nigerian%20academic%20forum/Obi44.pdf>

hal ini menyebabkan terdapatnya jarak antar etnis di Angola yang menjadikan *power-sharing* gagal dan konflik bereskalasi. Angola juga sedang dalam masa transisi yang menyebabkan Angola rawan akan konflik. Konflik tidak dapat dihindarkan saat Portugal ‘lepas tangan’ atau tidak sepenuhnya mengawal proses transisi kekuasaan dan *power-sharing* di mantan wilayah jajahannya.

Konflik di Angola mengalami eskalasi juga karena tidak adanya usaha dari pemerintah (MPLA), UNITA maupun FNLA untuk mengintervensi supaya tidak semakin parah. Melainkan ketiga pihak yang bertikai memilih jalan *contending* dengan mencari koalisi, mempersenjatai diri dan bersiap-siap untuk saling menghancurkan. Opsi *problem-solving* dikesampingkan oleh ketiga pihak karena mereka tidak dapat berkompromi satu dengan lainnya.

Jadi, konflik sipil di Angola mengalami eskalasi karena dalam susunan masyarakat Angola dikelompok-kelompokkan sehingga terdapat ‘jarak’ antara satu etnis dengan lainnya. Berlanjut dengan proses transisi kekuasaan yang tidak terkawal sehingga menimbulkan kegagalan pembagian kekuasaan. Berujung pada konflik perebutan kekuasaan yang tidak diimbangi dengan intervensi konflik yang efektif. Akhirnya konflik sipil di Angola terus mengalami eskalasi hingga waktu yang cukup lama.

Intervensi Asing dan pengaruhnya terhadap Konflik

Perang sipil di Angola membuka jalan untuk adanya intervensi asing. Definisi dari intervensi asing ialah transfer sumber daya dari *external state* kepada salah satu partai ‘kontestan’. Sumber daya secara luas diartikan sebagai dana, senjata, perlengkapan, material, maupun personil ahli yang mempunyai kemampuan nilai koersif.³¹ Intervensi dalam konflik ada dua macam: *partisan* dan *humanitarian*. Intervensi *partisan* adalah intervensi yang dilakukan pihak ketiga untuk membantu salah satu kontestan dalam konflik. Sedangkan, *humanitarian* lebih kepada usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.³²

³¹ Adam Lockyer, “Foreign Intervention and warfare in civil wars,” dilihat 20 Maret 2017, <http://ussc.edu.au/ussc/assets/media/docs/publications/Foreign-Intervention-and-Warfare-in-Civil-Wars.pdf>

³² *Ibid.*

Perlu dipahami terdapat beberapa jenis peperangan. Pada jurnal ini intervensi asing *partisan* merubah dinamika peperangan, dari *irregular* ke konvensional dan terakhir adalah gerilya. *Irregular warfare* adalah bentuk peperangan dimana jumlah persebaran pasukan antar *belligerents* imbang tetapi kemampuan militer mereka terbatas (kurang pelatihan militer, senjata jadul, peralatan seadanya). Perang konvensional ialah bentuk perang dimana jumlah persebaran pasukan imbang dan kemampuan militer sudah mumpuni (senjata canggih, prajurit professional). Terakhir, gerilya yaitu bentuk perang dimana persebaran pasukan tidak imbang, jadi pihak yang kalah jumlah menghindari pertempuran langsung.³³

Bentuk intervensi asing *partisan* ini memberi pengaruh memperpanjang perang sipil dan mengubah bentuk perang. Melihat pada awal konflik peperangan berbentuk *irregular* dimana para militan dari FNLA, UNITA, maupun MPLA tidak kompeten dalam disiplin militer serta kurang akan persenjataan. Mulai masuknya intervensi asing meng-eskalasi konflik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan, MPLA sempat kalah jumlah dibanding FNLA-UNITA. Namun, dengan adanya intervensi asing dapat mengubah nasib MPLA. Soviet dan Kuba yang secara masif memberi MPLA dengan mengirimkan puluhan ribu personel militer, alat perang yang canggih, dan bantuan ekonomi yang dapat membantu MPLA bertahan. Bantuan-bantuan terus mengalir untuk semua *belligerent* menjadikan pola perang berubah dari *irregular* ke konvensional. Saat distribusi kemampuan militer UNITA sudah tidak memadai maka bergantilah ke pada pola gerilya. Perang sipil juga belum kunjung selesai juga dikarenakan intervensi Amerika Serikat yang tetap memberi bantuan kepada UNITA secara tidak langsung sehingga UNITA tetap memiliki sumber daya untuk melawan pemerintah selama lebih dari dua dekade.

Dinamika dan Proses Mediasi³⁴

Runtuhnya Uni Soviet pada awal dekade 1990an, membuka jalan bagi PBB untuk mengintervensi konflik sipil di Angola. Selama hampir dua dekade

³³ Adam Lockyer, *Ibid.*

³⁴ Christine Messiant, "Why did Bicesse and Lusaka fail?," dilihat 16 April 2017, <http://www.c-r.org/accord-article/why-did-bicesse-and-lusaka-fail-critical-analysis>.

usaha PBB untuk mengintervensi konflik di Angola terhalang oleh kepentingan antagonis dari Amerika Serikat dan Uni Soviet.³⁵ Terdapat dua perjanjian yang ditengahi oleh PBB di Angola yaitu *Bicesse Accords* 1991 dan *Lusaka Protocol* 1994. Kedua perjanjian ini terlihat menjanjikan terutama bagi masyarakat Angola yang sudah lelah dengan perang sipil. PBB menunjuk *special representative* untuk membantu Angola dalam proses resolusi konflik. Pertama adalah perjanjian Bicesse yang berisi mengenai persetujuan MPLA untuk menerapkan sistem multi partai, diakuinya UNITA sebagai partai oposisi, akan diadakannya pemilu, demobilisasi pasukan UNITA dan integrasi dengan pemerintah. Syarat dan ketentuan awalnya dipatuhi oleh kedua pihak. Namun, setelah keluarnya hasil pemilu yang dilaksanakan pada September 1992, UNITA merasa dicurangi dan memilih untuk memobilisasi pasukannya, akhirnya perang sipil kembali pecah. Alasan UNITA memobilisasi pasukannya karena Savimbi sadar bahwa dalam perjanjian Bicesse *winner takes all*. Maksudnya, pemenang pemilu akan mendapat kekuasaan absolut atas Angola dan tidak harus membagi kekuasaan dengan oposisi. Tentu saja ini adalah kecacatan dari perjanjian Bicesse yang perlu diperbaiki.

PBB berharap pada Protokol Lusaka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Protokol ini ditandatangani di ibukota Zambia, Lusaka pada 1994. Akan tetapi, protokol ini tidak ditandatangani langsung oleh Jose Eduardo dos Santos (Presiden Angola) maupun Jonas Savimbi sebagai pemimpin UNITA.³⁶ Melainkan kedua pemimpin ini mendelegasikan tugas kepada wakilnya. Terlihat perasaan saling tidak percaya dalam penandatanganan protokol Lusaka. Syarat dan ketentuan dalam protokol ini kurang lebih sama dengan perjanjian Bicesse. Hal yang berbeda adalah integrasi antara kedua pihak lebih ditekankan dan larangan untuk membeli senjata bagi kedua pihak. Namun, karena dari awal kedua pihak tidak serius dalam menyetujui protokol Lusaka ini. Pemerintah maupun UNITA tetap nekat untuk mempersenjatai diri dan mengabaikan isi dari protokol Lusaka. Pada akhirnya perjanjian Bicesse dan protokol Lusaka ibarat angin lewat dalam konflik sipil di Angola ini. Adanya intervensi dari PBB ini malah

³⁵ Dr. Justin Pearce, wawancara via email oleh Rizqi Agung Nugroho, 21 April 2017, transkrip

³⁶ Christine Messiant, *Ibid.*

menguntungkan pemerintah (MPLA) karena mereka berhasil memenangkan pemilu dan menambah legitimasi mereka serta Amerika Serikat akhirnya mengakui pemerintahan MPLA pada 1993.³⁷ Sedangkan kondisi UNITA semakin terpuruk saat melakukan *blunder* mobilisasi pasukan pasca pemilu.

Dinamika perang sipil di Angola bukan hanya dipengaruhi oleh intervensi asing *partisan*. Akan tetapi, juga dengan eksploitasi sumber daya alam. Penarikan pasukan asing pada akhir dekade ke 1980an membuat pemerintah dan UNITA untuk berpikir jalan alternatif untuk membiayai perang. Sikap *contending* antara kedua pihak ini belum hilang. Tujuan pemerintah dan UNITA masih ingin saling mengancurkan. Eksploitasi sumber daya mineral menjadi pilihan, pemerintah mengeksploitasi minyak bumi dan UNITA menguasai wilayah rural penghasil berlian.³⁸ Cadangan minyak dan berlian di Angola lebih dari cukup untuk membiayai perang. Pemerintah dan UNITA mampu membeli senjata, ranpur, maupun peralatan canggih lainnya.³⁹ PBB tidak tinggal diam dengan memberikan sanksi kepada UNITA dan masyarakat internasional yang membeli berlian dari para pemberontak, sanksi ini dikeluarkan PBB pada akhir dekade 1990an.⁴⁰ Keuntungan berada dalam pihak pemerintah karena mereka tetap mendapat pemasukan dari hasil minyak.

Strategi Pemerintah terhadap resistensi UNITA

UNITA adalah organisasi yang dapat dikatakan sudah *established* dan diperlukan usaha ekstra untuk menghancurkannya. Semua strategi yang dilakukan pemerintah Angola mempunyai dampak mempersempit ruang gerak UNITA. Mulai dari mengadopsi sistem multipartai, penggunaan jasa *Private Military*, evakuasi petani, hingga kriminalisasi Savimbi. Belum lagi ditambah sanksi yang diberikan PBB untuk UNITA dalam perdagangan berlian dan senjata. Puncaknya ialah saat Jonas Savimbi ditembak mati pada Februari 2002 yang memaksa UNITA untuk menandatangani *Luena Memorandum of Understanding*.

³⁷ Christine Messiant, *Ibid.*

³⁸ Adrian Gonzalez, *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰“IS THE UN GETTING TOUGH ON SANCTIONS AND THE DIAMOND TRADE?,” dilihat 2 Juni 2017, <https://www.globalwitness.org/en/archive/un-getting-tough-sanctions-and-diamond-trade/>

Penjelasan singkat mengenai strategi pemerintah dalam menerapkan ‘*peace through war*’. Pemerintah melancarkan operasi militer guna mendamaikan konflik dengan UNITA yang telah berlangsung selama dua dekade lebih. Pertama adalah saat UNITA menguasai wilayah tambang, pemerintah menyewa jasa ‘tentara bayaran’ dari Afrika Selatan untuk merebut wilayah kekuasaan UNITA dengan strategi ini *income* UNITA semakin berkurang. Kedua, pemerintah mengevakuasi warga yang berada di wilayah rural ke wilayah kekuasaan pemerintah, terutama kaum petani. Petani menjadi profesi yang vital bagi UNITA karena dapat menyediakan suplai makanan guna keberlangsungan organisasinya, dengan evakuasi ini UNITA semakin terdesak. Ketiga, kriminalisasi UNITA dan Savimbi. Pemerintah berusaha merubah *image* UNITA dengan menginstruksi media nasional untuk menyebut UNITA sebagai ‘bandit bersenjata’.⁴¹ Adopsi sistem multipartai ternyata juga merupakan langkah yang menguntungkan bagi pemerintah, karena perubahan ini mengubah citra masyarakat internasional kepada pemerintah Angola yang dianggap lebih fleksibel. Terakhir adalah sanksi dari PBB yang melarang perdagangan *blood diamond*⁴² berhasil melumpuhkan organisasi bentukan UNITA.

Pada tahap ini konflik memasuki masa *readiness for conflict resolution*. Salah satu chapter yang Pruitt tulis dalam buku *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice* menjelaskan mengenai tahap kesiapan untuk resolusi konflik. Teori ‘kesiapan’ ini menjelaskan bahwa ‘kesiapan’ harus ada pada kedua belah pihak dengan menunjukkan motivasi mereka untuk menyudahi konflik. Motivasi untuk menyudahi konflik adalah fungsi langsung dari costs and risks yang berhubungan dengan konflik dan tidak ada hubungannya dengan kemungkinan memenangkan konflik. Pruitt juga menambahkan bahwa dalam

⁴¹ Justin Pearce, “*Peace accords in Angola : Contesting the meaning of success,*” dalam *Peace Agreements and Durable Peace in Africa*, ed. Grace Maina dan Erik Melander (University of KwaZulu-Natal Press 2016), h.23.

⁴² “Blood Diamond,” dilihat 2 Juni 2017, <http://time.com/blood-diamonds/>

mencapai ‘kesiapan’ untuk resolusi, konflik harus mengalami eskalasi dahulu. Semakin parah eskalasi, maka semakin tinggi tingkat ‘kesiapannya’.⁴³

Kematian Savimbi menjadi pukulan moral bagi UNITA terlebih lagi tidak lama setelah itu Antonio Dembo orang nomor dua UNITA juga meninggal dunia. Kematian Savimbi dan Dembo ini merupakan tingkat konflik di Angola mengalami eskalasi. Dalam kondisi ini, sebetulnya pemerintah dapat melanjutkan operasi ofensifnya terhadap UNITA dan kemungkinan untuk menang tinggi. Namun, tidak lama setelah itu pemerintah menginstruksi kepada FAA untuk menghentikan *offensive movements* terhadap UNITA. Pemerintah memilih untuk menyedahi konflik, memperhitungkan costs dan risks dan menganggap jalan ‘damai’ lebih baik ketimbang mengejar kemenangan absolut atas UNITA. Pembicaraan bermula antara jendral FAA dan UNITA pada 20 Maret dan berakhir pada 31 Maret 2002. MoU ditandatangani pada 4 April 2002.⁴⁴ Isi MoU hampir sama dengan Protokol Lusaka 1994. Perbedaannya adalah dalam MoU ini terdapat general amnesty yang bertujuan untuk mengampuni tindakan kriminal yang dilakukan prajurit maupun warga sipil selama konflik berlangsung.⁴⁵

Kali ini UNITA bersikap kooperatif dalam implementasi perjanjian perdamaian. Seolah tak mau kecolongan, pemerintah juga mem-bredeli UNITA. Setelah dilucuti, mantan prajurit UNITA tidak dikumpulkan dalam satu wilayah melainkan dipulangkan wilayah asal masing-masing menghindari gejolak yang berpotensi timbul.⁴⁶ Hingga abad ke-21 memasuki dekade pertama ini tidak lagi terjadi gejolak resistensi UNITA terhadap pemerintah. UNITA masih aktif dan mengikuti pemilu tahun 2008⁴⁷, hanya saja sebagai partai oposisi yang damai.⁴⁸

⁴³ Dean G. Pruitt “*Some Research Frontiers in the Study of Conflict and Its Resolution*,” dalam *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*, ed. Morton Deutsch, Peter T. Coleman and Eric C. Marcus (San Fransisco: Jossey-Bass A Willey Imprint 2006), 863.

⁴⁴ Justin Pearce dalam *Peace Agreements and Durable Peace in Africa*, ed. Grace Maina dan Erik Melander, Op cit, 26.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Rob Staeger, *Angola*, (Mason Crest Publisher: 2008) h.43.

⁴⁸ Inge Amundsen dan Markus Weimer “*Opposition Parties and the 2008 Parliamentary Elections in Angola*,” dilihat 30 April 2017, <https://www.cmi.no/publications/3103-opposition-parties-and-the-upcoming-2008>.

Kesimpulan

Setelah merdeka dari Portugis, Angola langsung memasuki masa perang sipil selama hampir tiga dekade. *Belligerents* dari perang sipil di Angola ialah MPLA dan UNITA, yang masing-masing berbasis dari kelompok etnis yang berbeda. Hubungan antar-etnis di Angola memang tidak harmonis, mengingat saat dijajah Portugis antara satu etnis dengan yang lainnya diperlakukan secara berbeda. Hal ini membekas hingga saat proses transisi kekuasaan dari Portugis ke Angola. *Power-sharing* tidak terjadi karena sentimen antar etnis ditambah sikap Portugis yang seolah ‘lepas tangan’ pergi begitu saja tanpa mengawal proses transisi kekuasaan. Eskalasi konflik tidak dapat dihindari, kekerasan menjadi pilihan. Pihak yang terkuatlah yang akan menjadi penguasa di Angola.

Problem-solving bukan merupakan pilihan. Kedua pihak memilih jalan *contending* dengan mengumpulkan aliansi dan mengizinkan kekuatan asing untuk mengintervensi. Kehadiran kekuatan asing di Angola memberikan dinamika terhadap perang sipil di Angola. Militer dari masing-masing *belligerent* dibekali dengan senjata baru, peralatan canggih, dan disiplin militer yang membawa konflik ke tingkat yang baru. Setelah intervensi *partisan* berakhir, PBB mulai masuk untuk mendamaikan pihak yang bertikai di Angola. Perjanjian Bicesse dan Protokol Lusaka menandai kehadiran PBB di Angola. Akan tetapi kedua perjanjian tersebut gagal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan mandat dari PBB. Akhirnya pemerintah Angola memilih turun tangan untuk menyelesaikan konflik dengan cara militer. UNITA dilumpuhkan oleh tentara pemerintah dengan ditembak matinya Jonas Savimbi, pemimpin UNITA. Hal ini memaksa UNITA untuk ‘berdamai’ dengan pemerintah.

Pada intinya bibit konflik di Angola ini sudah ditanam pada zaman kolonial. Menyebabkan adanya jarak antar etnis membuat proses *power-sharing* tidak terjadi pada masa transisi. Hal ini berujung dengan konflik, ditambah lagi intervensi asing partisan yang menambah dinamika dan memperpanjang konflik. Mediasi juga sempat dilakukan tetapi nihil karena adanya *mutual distrust* dari kedua pihak PBB yang kurang serius dalam mengalokasikan sumberdayanya. Alhasil, pemerintah menerapkan strategi ‘*peace through war*’ dengan

menyudutkan UNITA lewat penggunaan jasa PMC, relokasi kaum petani, dan kriminalisasi Savimbi yang sukses mengepung UNITA hingga menewaskan pemimpinnya Jonas Savimbi. Sehingga memaksa UNITA untuk berunding untuk terakhir kalinya dan menandatangani MoU Luena. Dalam hal ini pemerintah Angola (MPLA) sukses dalam mewujudkan ‘perdamaian’.

Daftar Pustaka

<Artikel Jurnal>

Amundsen , Inge dan Markus Weimer. “Opposition Parties and the 2008 Parliamentary Elections in Angola.” Dilihat 30 April 2017. <https://www.cmi.no/publications/3103-opposition-parties-and-the-upcoming-2008>.

Gonzalez, Adrian. “Petroleum and its Impact on Three Wars in Africa: Angola, Nigeria and Sudan.” Dilihat 17 April 2017. <http://www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-conflict-and-development/issue-16/petroleumangolanigeriasudan.pdf>.

Lieberman , Evan S. dan Prena Singh. “The Institutional Origins of Ethnic Violence.” Dilihat 12 Maret 2017. http://dc-20788-1635065795.us-east-1.elb.amazonaws.com/system/files/research/documents/lieberman_the_institutional_origins_of_ethnic_violence.pdf.

Lockyer, Adam. “Foreign Intervention and warfare in civil wars.” Dilihat 20 Maret 2017. <http://ussc.edu.au/ussc/assets/media/docs/publications/Foreign-Intervention-and-Warfare-in-Civil-Wars.pdf>.

Messiant, Christine. “Why did Bicesse and Lusaka fail?.” Dilihat 16 April 2017. <http://www.c-r.org/accord-article/why-did-bicesse-and-lusaka-fail-critical-analysis>.

Michalopoulos dan Elias Papaioannou. "THE LONG-RUN EFFECTS OF THE SCRAMBLE FOR AFRICA." National Bureau of Economic Research. November 2011. dilihat 25 Desember 2016. <http://www.nber.org/papers/w17620>.

Onyefulu, Dr. T. Obi. "THE PORTUGUESE IN ANGOLA: COLONIAL THEORY AND THE POLICY OF ASSIMILATION." The Nigerian Academic Forum. dilihat 21 Desember 2016. <http://www.globalacademicgroup.com/journals/the%20nigerian%20academic%20forum/Obi44.pdf>.

<Buku>

Birmingham, David. *A Short History of Modern Angola*. Oxford University Press : 2015.

Pearce, Justin. "*Peace accords in Angola : Contesting the meaning of success.*" dalam *Peace Agreements and Durable Peace in Africa*, ed. Grace Maina dan Erik Melander. University of KwaZulu-Natal Press 2016.

Pruitt , Dean G.. "*Some Research Frontiers in the Study of Conflict and Its Resolution.*" dalam *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*, ed. Morton Deutsch, Peter T. Coleman and Eric C. Marcus. San Fransisco: Jossey-Bass A Willey Imprint 2006.

Staeger, Rob. *Angola*. Mason Crest Publisher: 2008.

Wright, Stephen L. *Angola A Modern Military History 1961-2002*. Palgrave Macmillan : 2011.

<Internet>

BBC News. "Angola: The roots of conflict." dilihat 25 Desember 2016.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/01/99/angola/263954.stm.

BBC News. "Savimbi 'died with gin in hand'." dilihat 26 Desember 2016.
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1839252.stm>.

Boyes, Steve. "Getting to Know Africa: 50 Interesting Facts." Dilihat 13 Mei 2016. <http://voices.nationalgeographic.com/2013/10/31/getting-to-know-africa-50-facts/>

CRW Flags. "FNLA (Angola)." Dilihat 24 Desember 2016.
<https://flagspot.net/flags/ao%7Dfnla.html>

DeMaio, Jennifer L. "Plausible Deniability: Proxy Wars in Africa." Dilihat 13 Mei 2016. <http://www.fletchersecurity.org/#!de-maio-/cpm1>

Global Security, "Angola-Introduction." Dilihat 24 Desember 2016.
<http://www.globalsecurity.org/military/world/angola/intro.htm>. State University. "Angola – History & Background." Dilihat 13 Mei 2016.
<http://education.stateuniversity.com/pages/32/Angola-HISTORY-BACKGROUND.html>

Globalsecurity.org . "Angola National Liberation 1961-1974 (1966-1989)." Dilihat 13 Mei 2016.
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/angola.htm>

Global Security. "UNITA." Dilihat 24 Desember 2016.
<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/unita.htm>

Global Witness. "IS THE UN GETTING TOUGH ON SANCTIONS AND THE DIAMOND TRADE?." Dilihat 2 Juni 2017.
<https://www.globalwitness.org/en/archive/un-getting-tough-sanctions-and-diamond-trade/>

Hewwit, Dawn. "Peacekeeping and the Lusaka Protocol." Questia. dilihat 26 Desember 2016. <https://www.questia.com/library/journal/1G1-80056876/peacekeeping-and-the-lusaka-protocol>.

Human Rights Watch Report. "IV. THE LUSAKA PEACE PROCESS." dilihat 26 Desember 2016.
<https://www.hrw.org/reports/1999/angola/Angl998-04.htm>.

Inter-Parliamentary Union. "Angola 1992 Elections." dilihat 26 Desember 2016.
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2007_92.htm. Human Rights Watch Report. "IV. THE LUSAKA PEACE PROCESS." dilihat 26 Desember 2016. <https://www.hrw.org/reports/1999/angola/Angl998-04.htm>.

Kusumaningrum, Diah. "Eskalasi dan Deeskalasi Konflik." Universitas Gadjah Mada, Dilihat 12 Maret 2017.
<http://diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Eskalasi.doc>.

Lewis, Paul. "Angola and Namibia Accords Signed." Dilihat 22 Maret 2017.
<http://www.nytimes.com/1988/12/23/world/angola-and-namibia-accords-signed.html>.

South Africa History Online. "Cuba and the struggle for democracy in South Africa." dilihat 25 Desember 2016.
<http://www.sahistory.org.za/article/cuba-and-struggle-democracy-south-africa>.

South Africa History Online. "The Angolan Civil War (1975-2002): A Brief History." dilihat 25 Desember 2016.
<http://www.sahistory.org.za/article/angolan-civil-war-1975-2002-brief-history>.

Tanenhaus, Sam. "Playing Dominoes : A re-examination of the Vietnam War argues it was politically necessary." Dilihat 13 Mei 2016.
<https://www.nytimes.com/books/99/10/24/reviews/991024.24tannent.html>

The Atlantic. "Cuba: Havana's Military Machine." dilihat 26 Desember 2016.
<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1988/08/cuba-havanas-military-machine/305932/>.

The Vietnam War . "What is a Proxy War?" Dilihat 13 Mei 2016.
<http://thevietnamwar.info/proxy-war/>

TIME. "Blood Diamond." Dilihat 2 Juni 2017. <http://time.com/blood-diamonds/>

TIME. "Neto's Death." Dilihat 25 Desember 2016.
<http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,947403,00.html>

<Wawancara>

Justin Pearce, wawancara via email oleh Rizqi Agung Nugroho, 21 April 2017.